

POLA PEMANFAATAN *WEBSITE* DINAS PERKEBUNAN SEBAGAI LAYANAN *E-GOVERNMENT* PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sabransyah¹, Erwiantono², Kadek Dristiana Dwiviyani³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menggambarkan/mendeskripsikan mengenai pemanfaatan Website Dinas Perkebunan sebagai Layanan E-Government Provinsi Kalimantan Timur.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara dan dokumentasi, key informan PPID dinas perkebunan dan Informan masyarakat pengunjung Website.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pola pemanfaatan website dinas perkebunan sebagai layanan e-government yang ada di Kalimantan Timur sudah cukup baik, sangat efektif dan efisien, memiliki beberapa aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait Dinas Perkebunan, membantu mengurangi penggunaan limbah kertas, dengan adanya penerapan ini secara keseluruhan membantu dan memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya Kalimantan Timur.

Kata Kunci : Pola Pemanfaatan Website, Dinas Perkebunan Daerah, Layanan E-Goverment

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Teknologi komunikasi dan informasi dirasakan berkembang secara luar biasa yang melanda individu akibat penggunaan media akhirnya mendorong media untuk terus berinovasi dalam memenuhi kebutuhan individu. Media tradisional seperti surat kabar, majalah, radio saat ini mulai bergeser menuju media baru atau media *online* (internet). Perkembangan teknologi komunikasi yang terus bergerak membuat segala aspek kehidupan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:Sabransyah.aan@gmail.com

² Dosen Pembimbing I dan Dosen Pengajar Fakultas Perikanan, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Pembimbing II dan Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

individu memasuki era baru yaitu era globalisasi yang menuntut kompetisi komunikasi dan perang citra. Pada bidang ekonomi muncul *e-commers*, pada bidang pendidikan muncul *e-learning*, dan pada pemerintahan sendiri adalah *e-government*. Bentuk-bentuk inilah yang sekarang mulai berkembang dan menuntut masyarakat untuk lebih mampu menguasai teknologi yang berbasis *web*.

Pada bagian pemerintah pun juga turut terkena dampak perkembangan teknologi melalui media baru (internet). Pemerintah dituntut untuk mampu memberikan informasi kepada masyarakat secara efektif dan efisien yang mampu diakses kapanpun dan dimanapun hal ini mendorong munculnya *e-government* yang digunakan pemerintah sebagai wujud dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat yang semakin tinggi.

Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor. 14 Tahun 2008, memberikan angin segar warga negara Republik Indonesia yang membutuhkan data dan informasi untuk kepentingan riset, jurnalistik, laporan dan lain-lain. Pelayanan informasi publik dengan menyiapkan infrastruktur dan struktur seperti yang diamanatkan oleh UU KIP sangat sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor. 3 tahun 2003 tentang penyelenggaraan *e-government* di Indonesia. Penerapan *e-government* pada layanan pemerintah bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

E-Gov atau *Electronic Government* merupakan bentuk dari implementasi penggunaan teknologi informasi bagi pelayanan pemerintah kepada publik. Yaitu bagaimana pemerintah memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui sebuah media sosial *website*. (Satriya,2006:38) Perbedaan pemahaman, cara pandang dan tindakan atas *e-government* telah menimbulkan distorsi serta penyimpangan atas maksud pembuatan *e-government* itu sendiri.

Dalam berita kedinasan tanggal 29 Desember 2016 *website* disbun.kaltimprov.go.id, Dinas Perkebunan jadi SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) Percontohan KIP Berbasis *Website*. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur, H. Awang Faroek Ishak menginstruksikan agar setiap SKPD membuat media informasi berbasis *web* dalam rangka menunjang kebutuhan informasi publik dengan profesional bagi yang tidak update agar memperbaiki dan maksimalkan pengelolaannya.

Dalam kesempatan tersebut, Faroek juga menyebutkan, Dinas perkebunan (Disbun) merupakan SKPD yang berhasil melaksanakan pengelolaan keterbukaan informasi berbasis *website*, sehingga dianjurkan seluruh SKPD bisa belajar langsung mengenai Pengelolaan *website* ke Dinas Perkebunan.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pola pemanfaatan website dengan layanan e-government. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “POLA PEMANFAATAN *WEBSITE* SEBAGAI LAYANAN *E-GOVERNMENT* DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR”

Rumusan Masalah

Masalah merupakan unsur pokok dalam penelitian ilmiah, menentukan

masalah merupakan langkah awal dalam setiap penelitian ilmiah. Masalah merupakan objek penelitian ilmiah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimana Pola Pemanfaatan *Website* Dinas Perkebunan sebagai Layanan *E-Government* Provinsi Kalimantan Timur”

Kerangka Dasar Teori

Teori SMCR

SMCR merupakan singkatan dari Source-Message-Channel-Receiver. Teori ini dikembangkan oleh David K. Berlo pada tahun 1960 yang merupakan perluasan dari teori Laswell. Secara rinci pendekatan SMCR adalah sebagai berikut:

S - Source - sumber atau komunikator.

M - Message - pesan.

C - Channel - media.

R - Receiver - penerima atau komunikan.

1. Sumber atau Komunikator (Source) yang berarti komunikator adalah PPID Dinas Perkebunan.
2. Pesan (Message) yang berarti pesan yaitu berupa postingan gambar atau kata-kata mengenai informasi atau kegiatan yang telah dilakukan.
3. Media (Channel) yang berarti saluran atau media adalah website Disbun.kaltimprov.go.id.
4. Penerima dan Komunikan (Receiver) yang berarti penerima atau komunikan adalah pengunjung *website*.

Effendy (2003 :256), istilah *Channel* atau media, komponen tersebut mengandung dua pengertian yaitu primer dan sekunder. Pada penelitian ini media sebagai saluran primer adalah lambang, yaitu gambar, tulisan, warna, atau bahasa. Sedangkan sekunder adalah media yang berwujud, baik media misalnya surat kabar, televisi atau internet, maupun nir-massa misalnya surat, telepon, atau poster.

Pemanfaatan Website Pemerintahan

Menurut Indrajit (2006: 37-39) Manfaat website bagi instansi pemerintahan sangat banyak, mulai dari untuk instansi pemerintahan itu tersendiri hingga untuk masyarakat. Maksudnya di sini adalah pemerintahan bisa menginformasikan kepada masyarakat tentang apa saja visi misi pemerintahan hingga tugas-tugas pemerintahan. Yang tujuannya untuk kemajuan pemerintahan tersebut. Secara garis besar manfaat *website* Pemerintah adalah: (1) Menampilkan secara interaktif jurnal informasi dan pembangunan daerah, (2) memaparkan segala informasi mengenai potensi daerah dalam segala aspek kehidupan daerah pemerintahan yang bersangkutan, (3) Mensosialisasikan kebijakan/program pemerintah dan informasi pemerintah lainnya kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang terjangkau oleh jaringan internet, (4) Memberikan media alternatif bagi peningkatan pembangunan daerah, melalui berbagai forum interaktif, yang meliputi, forum perdagangan, forum usaha kecil dan menengah, forum peningkatan agribisnis, forum kerjasama bisnis/*partnership*, forum lapangan kerja dan usaha, dll. (5) Menyediakan media bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan *feedback*/masukan dari anggota masyarakat dan pelaku bisnis lainnya, menjadikan *website* ini sebagai satu-satunya portal yang menyajikan *Journal*, Informasi, dan potensi daerah secara terpadu dan menyeluruh. (6) Menjadikan *website* ini sebagai media interaksi antara masyarakat dengan pemerintah daerahnya, antara dunia usaha dan pemerintah daerahnya, dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, serta masyarakat luas lainnya, dan (7) Sebagai langkah awal terwujudnya implementasi *e-government* Pemerintah Daerah.

Komunikasi Pemerintahan

Menurut Ndraha (2011: 38-39) Komunikasi antar Pemerintahan, Merupakan proses timbal balik penyampaian informasi dan pesan antara pemerintah dengan yang diperintah, pihak yang satu menggunakan *frame of reference* pihak yang lain pada posisi dan peran tertentu, sehingga perilaku dan sikap yang lain terbentuk, berubah atau terpelihara, berdasarkan kesaling pengertian dan saling kepercayaan antara kedua belah pihak dan sebagai salah satu pembentuk konstruksi komunikasi pemerintahan, dimaksudkan sebagai jalan untuk memahami interaksi antar manusia.

E-Government

Menurut Indrajit (2006 : 3-4) *E-Gov* atau *Electronic Government* merupakan bentuk dari implementasi penggunaan teknologi informasi bagi

pelayanan pemerintah kepada publik. Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan *e-Government* secara ringkas, padat, dan jelas, yaitu :

E-government refers to the delivery of government information and service online through the internet or other digital means.

(E-pemerintahan mengacu kepada penyampaian informasi dan pelayanan pemerintah secara online melalui internet atau alat digital lainnya).

E-Government merupakan suatu mekanisme interaksi baru modern antara pemerintahan dengan masyarakat dan kalangan yang berkepentingan (*stakeholder*).

New Media

New media merupakan perkembangan baru dari media-media yang telah digunakan manusia. Karakternya merupakan bentuk digital tentu memudahkan dalam bertukar informasi dan berbagai kegiatan lainnya. Namun dalam perkembangannya, *new media* bisa memberikan nilai negatif juga bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi melahirkan produk *new media*. Suatu produk teknologi akan berkembang pesat jika dapat mensejahterakan masyarakat dan bernilai efektivitas tinggi. Perkembangan teknologi komunikasi informasi harus diakui memberikan paradigma baru yang mengubah keseluruhan cara pandang manusia tentang berbagai masalah dan persoalan yang ada di muka bumi ini. Perubahan paradigma ini juga memberikan dampak buruk setelah lahirnya *new media*.

Definisi Konseptual

Pola pemanfaatan *website* yang digunakan sebagai komunikasi informasi *E-government* yang dilakukan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi pada penggunaan teknologi pada *website* Dinas Perkebunan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan mengkomunikasikan informasi pada pengunjung situs *website* Dinas Perkebunan.

Metode Penelitian

Jenis Peneliiian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Fokus Penelitian

Dalam hal ini, peneliti memfokuskan penelitian ini untuk mengetahui: Pola Pemanfaatan *Website* Dinas Perkebunan Sebagai Layanan *E-Government* Provinsi Kalimantan Timur, yang dijabarkan sebagai :

a. Pola penerapan prinsip *Service to Citizen* menjadi *Service by Citizen*.

- b. Pola perubahan fenomena “*Citizen in Line*” menjadi “*Citizen on Line*”.
- c. Pola perubahan fenomena “*Digital Divide*” (kesenjangan digital) dan menjadi “*Digital Democracy*” (demokrasi digital).
- d. Pola perubahan prinsip “*Paper-Based*” menjadi “*Government Online*”.
- e. Pola pemanfaatan “*Digital Knowledge*” sebagai pengganti dari “*Physical Knowledge*”

Jenis Dan Sumber Penelitian

1. Data Primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli peneliti mengambil informan dengan cara purposive sampling yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang memberikan data yang berjumlah 1 orang sebagai key informan.

Dalam penelitian ini peneliti memilih bapak Muhammad Reza Pahlevi S.HUT selaku PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen) sebagai *key informan*. Karena dinilai mempunyai kriteria seperti di paparkan di atas. Kemudian informan pendukung tersebut adalah Fhanji Wilis Pratama, Andi Azza Az Zahra, Farahdina Nur Rizkyani, Ibu Riza Anggun Suciani, dan Bapak Iswan Suyanto,S.HUT sebagai informan.

2. Data Skunder, yaitu data penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data skunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, seperti data-data yang mendukung dari buku-buku yang sudah di publikasikan maupun yang belum di publikasikan. Untuk menunjang penelitian ini diambil dari data-data yang berupa dokumen-dokumen yang berasal dari data yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti yang didasarkan atas pengamatan secara langsung untuk memperoleh keyakinan tentang keabsahan data.

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancara disebut *resource*. Wawancara berguna untuk

mendapatkan data dari tangan pertama (primer), sebagai pelengkap dan penguji hasil dari teknik pengumpulan data lainnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang memang terkait dengan bahan penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pola Pemanfaatan Website Sebagai Layanan E-Government Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa pola pemanfaatan website dinas perkebunan provinsi Kalimantan timur adalah mendapatkan keuntungan yang banyak, seperti kemudahan dalam mengakses data informasi, hemat biaya fisik serta pengurangan limbah kertas. Pola pemanfaatan yang berpengaruh untuk perubahan pola pikir masyarakat tentang teknologi, sehingga dapat dikatakan pola pemanfaatan *website* sebagai layanan *e-government* dianggap sangat efektif dan efisien.

Pola penerapan prinsip Service to Citizen menjadi Service by Citizen

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dari website tersebut dirasa sudah cukup lengkap dan mudah, tidak perlu mendatangi lokasi tetapi hanya lewat website saja.

Pola perubahan fenomena "Citizen in Line" menjadi "Citizen on Line

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dalam Penggunaan website sebagai sarana pelayanan publik pada masyarakat pekebun dianggap sangat efektif dan efisien, karena efektif itu artinya layanan website sebagai media tepat sasaran, mudah, dan berdayaguna membantu masyarakat pekebun dalam memperoleh informasi terkait perkebunan secara akurat dan transparan. Efisien artinya layanan website sebagai media yang mampu memberikan balasan informasi, atau respon kepada masyarakat pekebun secara cepat, murah dan singkat tanpa merepotkan mereka untuk datang langsung kekantor dinas perkebunan provinsi kalimantan Timur.

Pola perubahan fenomena "Digital Divide" (kesenjangan digital) dan menjadi "Digital Democracy (demokrasi digital).

Berdasarkan pernyataan yang didapat disimpulkan bahwa pola perubahan fenomena "*Digital Divide*" dimana yang awalnya mereka melakukannya secara manual itu menjadi lebih modern yaitu melalui situs web, itu menjadi pola pikir jadi terkait dengan teknologi tadi dari awalnya

mereka manual mendapatkan informasi, terus dengan adanya website ini pola pikir mereka berubah jadi mereka tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mendapatkan informasi, jadi cukup melalui situs web saja.

Pola perubahan prinsip “Paper-Based” menjadi “Government Online”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, pihak disini kita bisa menekan biaya penggunaan, apabila dulu menggunakan *paper based* kita perlu biaya percetakan seperti foto copy dan pemborosan kertas, sedangkan menggunakan *government online* kita bisa berbagi berbentuk soft file yang bisa dibuka melalui handphone dan komputer pengguna secara langsung.

Pola pemanfaatan “Digital Knowledge” sebagai pengganti dari “Physical Knowledge”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan adanya aplikasi semacam *mailing list*, *homepage*, *newgroups*, dan lain sebagainya, pengetahuan berharga dari seseorang atau lembaga secara instan dan murah dapat disebarkan dan dinikmati oleh siapa saja yang membutuhkannya melalui dunia maya.

Harapannya adalah bahwa kualitas pengetahuan masyarakat akan berkembang secara cepat dan signifikan melalui pemanfaatan sistem dan teknologi informasi yang ada. Karena proses penciptaan dan penyebaran pengetahuan secara digital jauh lebih mudah dan murah dibandingkan dengan proses penyebaran pengetahuan secara konvensional yang membutuhkan banyak sekali fasilitas dan aset fisik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan mengenai Pola Pemanfaatan Website Dinas Perkebunan Sebagai Layanan *E- government* Provinsi Kalimantan Timur sepenuhnya telah menerapkan fungsi manajemen dengan baik.

Pola penerapan prinsip Service to Citizen menjadi Service by Citizen

Dalam pola penerapan ini pelayanan yang diberikan sudah dapat memberikan masyarakat kemudahan dalam memperoleh informasi, pelayanan yang diberikan cukup baik, fasilitas untuk memenuhi kebutuhan terpenuhi dan lengkap, pemanfaatan website ini juga sudah diatur oleh inpres No. 3 terkait Implementasi *E-government*. Target pemerintah khususnya Dinas Perkebunan meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan keterbukaan informasi akan terus dipertahankan.

Pola perubahan fenomena *Citizen in Line* menjadi *Citizen Online*

Keuntungan yang didapat yaitu lebih menjadi efektif dan efisien. Informasi yang diterima oleh masyarakat teramat ceoat untuk diterima. Dari tahun ke tahun pemanfaatan website ini terus berkembang mengikuti zaman. Tidak ada pungutan biaya didalamnya. Memiliki saluran media sosial, seperti : Instagram, Whatsapp, Facebook, twitter.

Pola perubahan fenomena *Digital divide* menjadi *Digital democracy*

Dalam hal ini pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat, tidak ada kesenjangan social antara masyarakat yang melek teknologi maupun yang tidak melek teknologi. Dan mensupport dalam kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Menyampaikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang perkebunan seperti, harga omoditi, berita terkait kedinasan, bibit atau benih perkebunan, data luas area dan produksi, dan teknologi terapan perkebunan.

Pola perubahan prinsip *Paper-Based* menjadi *Government Online*

Pemanfataan perubahan ini sangat memudahkan masyarakat untuk mengakses data informasi, lebih hemat biaya dalam bentuk *soft file*. Dapat membantu mengurangi dampak penggunaan kertas sumber daya fisik.

Pola pemanfaatan *Digital Knowledge* sebagai pengganti dari *Physical Knowledge*

Keuntungan dalam pemanfaatan ini adalah ketika proses penyebaran pengetahuan secara digital jauh lebih mudah dibandingkan proses penyebaran pengetahuan secara konvensional yang membutuhkan banyak sekali fasilitas dan aset fisik. Adapun informasi yang diperoleh sangat terperinci, disajikan dengan data yang sesuai dengan permohonan masyarakat.

Saran

Dalam penelitian ini peneliti ingin sampaikan sebagai saran dan masukkan kepada Dinas Perkebunan pemerintah provinsi Kalimantan Timur yaitu :

1. Perlu meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang berlatarbelakang IT pada Dinas Perkebunan daerah.
2. Memberikan pelatihan dan pendidikan terkait penerapan e-government
3. Mengupgrade kembali situs web yang ada di setiap tahunnya supaya ada peningkatan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Cangara, Hafied. 2007. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewdney Andrew and Ride Peter. 2006. *The New Media Handbook*. Newyork: Routledge.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori & Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala, Siti Karlinah, 2007, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Hasan, Erliana, M.Si. 2010. *Komunikasi Pemerintahan*. Refika Aditama. PT. Refika Aditama.
- Hidayanto Djamal dan Andi Fachruddin. 2011. *Dasar-dasar Penyiaran*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *E-Government Strategi Pembangunan dan pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*.Yogjakarta: Andi.
- Kominfo, Bunga Rampai. 2011.*Membangun Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan APTIKA dan IKP Balitbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sumber Internet :

<http://disbun.kaltimprov.go.id/>

<http://disbun.kaltimprov.go.id/berita-1106-disbun-jadi-skpd-percontohan-pengelolaan-kip-berbasis-website.html>